



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah/ Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

TOSIRIN BIN MAD MARSUM, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lipu Masagena, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

SADIEM BINTI SARINO, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lipu Masagena, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan **Pemohon II** disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.AdI tanggal 8 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **17 Februari 1992** Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam bertempat yang dahulu bernama Desa Suka Mulya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, sekarang bernama

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lipu Masagena, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus gadis usia 15 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Sarino**, dan dinikahkan imam Desa bernama **Oom Trisman** serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Junuddin** dan **H. Hardini** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;

- 1) Yohana, perempuan umur 30 tahun, sudah menikah (Pisah KK)
- 2) Warsini, perempuan umur 26 tahun
- 3) Reskiana, perempuan umur 16 tahun
- 4) Reskiani, perempuan umur 16 tahun
- 5) Hendra Saputra, perempuan umur 10 tahun;

5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya sekarang Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, dengan alasan para Pemohon tidak memahami adanya kewajiban pendaftaran nikah dan jarak kediaman para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama setempat cukup jauh, sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang, padahal saat ini para Pemohon membutuhkan kutipan buku nikah untuk berbagai keperluan administrasi;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **17 Februari 1992** bertempat yang dahulu bernama Desa Suka Mulya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, sekarang bernama Desa Lipu Masagena, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada **17 Februari 1992** dahulu di Desa Suka Mulya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, sekarang di Desa Lipu Masagena, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Andoolo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdI.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap surat permohonan tersebut Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Ujo Sudiono bin Sujono**, umur 84 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Rakyat (SR), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lipu Masagena, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, saksi merupakan kakek Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan hadir saat pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 17 Februari 1992 di Desa Suka Mulya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, sekarang bernama Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarino;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah tersebut dengan diwakili oleh Imam Desa yang bernama Oom Trisman untuk melakukan ijab dan qabul dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Junuddin dan Bapak H. Hardini, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka pada usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan pada usia 15 tahun;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama : 1) Yohana, perempuan umur 30 tahun, sudah menikah;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdI.



2) Warsini, perempuan umur 26 tahun; 3) Reskiana, perempuan umur 16 tahun; 4) Reskiani, perempuan umur 16 tahun; dan 5) Hendra Saputra, perempuan umur 10 tahun;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon tidak memahami adanya kewajiban pendaftaran nikah, jarak kediaman para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama setempat cukup jauh, dan Pemohon II belum cukup umur sehingga tidak bisa mengurus pernikahan tersebut;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan pernikahannya dan kepentingan hukum lainnya ;

2. **Saris bin Suminoto**, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Teporombua, Kecamatan Basala, Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan, saksi merupakan paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan hadir saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Suka Mulya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, sekarang bernama Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 17 Februari 1992;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarino;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah tersebut dengan diwakili oleh Imam Desa yang bernama Oom Trisman untuk melakukan ijab dan qabul dengan Pemohon I
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak H. Hardini dan Bapak Junuddin, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jelek pada usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan pada usia 15 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama : 1) Yohana, perempuan umur 30 tahun, sudah menikah; 2) Warsini, perempuan umur 26 tahun; 3) Reskiana, perempuan umur 16 tahun; 4) Reskiani, perempuan umur 16 tahun; dan 5) Hendra Saputra, perempuan umur 10 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon tidak memahami adanya kewajiban pendaftaran nikah, jarak kediaman para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama setempat cukup jauh, dan Pemohon II belum cukup umur sehingga tidak bisa mengurus pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan pernikahannya dan kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Desa Suka Mulya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, sekarang bernama Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 17 Februari 1992, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarino dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Oom Trisman untuk melakukan ijab Kabul dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Junuddin dan H. Hardini, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14–18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39–44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4),

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) dan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi keterangan 2 orang saksi tersebut dinilai satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 17 Februari 1992 di Desa Suka Mulya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, sekarang bernama Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarino dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Oom Trisman. untuk melakukan ijab Kabul dengan Pemohon I dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Junuddin dan H. Hardini;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejak pada usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan pada usia 15 tahun;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama : 1) Yohana, perempuan umur 30 tahun, sudah menikah; 2) Warsini, perempuan umur 26 tahun; 3) Reskiana, perempuan umur 16 tahun; 4) Reskiani, perempuan umur 16 tahun; dan 5) Hendra Saputra, perempuan umur 10 tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan Para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya dalam norma hukum yang terkandung dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarino, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama Junuddin dan H. Hardini maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Hakim kembali mengetengahkan norma hukum yang terkandung dalam dalil syar'i yang termuat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب والأم ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian pamannya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sehingga Pemohon I

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan pada saat menikah dan Para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan Para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ini terjadi setelah diberlakukannya perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga menggunakan ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 tahun. Sehubungan dengan fakta pada waktu menikah, Pemohon II berusia 17 tahun, maka usia Pemohon II pada waktu menikah belum memenuhi ketentuan tersebut, akan tetapi demi kemanfaatan para Pemohon maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dan untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1992 di Desa Suka Mulya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, sekarang bernama Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala yang mewilayahinya tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**TOSIRIN BIN MAD MARSUM**) dengan Pemohon II (**SADIEM BINTI SARINO**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1992, di Desa Suka Mulya, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Kendari, sekarang bernama Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan diucapkan

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd.

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	550.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdI.



Rahmini, S.Ag.

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)